



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Pesisir Barat ;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat ;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;

9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) , yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

1. Dana Pekon setiap Pekon dihitung berdasarkan :
 - a. Dana pekon setiap kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b. Alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap pekon sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus);
 - c. Alokasi dana dihitung berdasarkan formula yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap pekon dengan bobot sebagai berikut:
 - 25% (Dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah;
 - 30% (Tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Rumus perhitungan dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dana pekon kabupaten dikurangi alokasi dasar dikali alokasi berdasarkan formula dengan rincian rumus sebagai berikut:

Dana Pekon = (Dana Pekon kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon Kabupaten)].

Langkah-langkah operasional dalam perhitungan dana pekon terdiri dari 3 (tiga) tahapan:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan;
- c. Tahap Akhir.

Pasal 3

Rincian kegiatan pada tahap persiapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dari informasi yang diperlukan dalam proses perhitungan yaitu:
 1. Dokumen rincian Dana Pekon setiap kabupaten Yang ditetapkan Pemerintah;
 2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wialayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis
 - a. Menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel*;
 - b. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil perhitungan.

- b. Menyiapkan Kertas Kerja (Worksheet) dalam bentuk file excel dengan standar format yang telah ditetapkan.
- c. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (worksheet) dan file excel hasil perhitungan.

Pasal 4

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
 - 1. Nama kabupaten/kota pada baris (a);
 - 2. Tahun Anggaran pada baris (b);
 - 3. Pagu Dana Pekon Kabupaten/Kota pada baris (c);
 - 4. Jumlah Pekon pada baris (f);
 - 5. Bobot Jumlah Penduduk Pekon sebesar 25% pada baris (g);

 - 6. Bobot Angka Kemiskinan Pekon sebesar 35% pada baris (h);
 - 7. Bobot Luas Wilayah Pekon sebesar 10% pada baris (i);
 - 8. Bobot Indeks Kesulitan Geografis 30% pada baris (j);
 - 9. Nomor urut pada kolom (1);
 - 10. Nama Kecamatan pada kolom (2);
 - 11. Nama Pekon pada kolom (2), setelah Nama Kecamatan;
 - 12. Jumlah Penduduk Pekon pada kolom (4);
 - 13. Jumlah Penduduk Miskin Pekon pada kolom (7);
 - 14. Luas Wilayah Pekon pada kolom (10); dan
 - 15. Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

- b. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut :
 - 1. Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
 - a. Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:
$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota}$$
 - b. Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengan rumus:
$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota}$$

 - 2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Pekon setiap Pekon (Alokasi Dasar) pada kolom (3), dengan rumus :
$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{jumlah Desa Di Kab. Kota yang bersangkutan}}$$

 - 3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Pekon setiap Pekon dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Rasio Jumlah Penduduk Pekon (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:
$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$

 - b. Bobot Jumlah Penduduk Pekon (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:
$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

 - c. Rasio Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:
$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$

- d. Bobot Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e. Rasio luas wilayah Pekon (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kab Kota yang bersangkutan}}$$

- f. Bobot Luas Wilayah Pekon (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g. Rasio Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab Kota yang bersangkutan}}$$

- h. Bobot Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i. Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} - \text{Bobot JPM} - \text{Bobot LW} - \text{Bobot IKG}$$

- j. Bagian Alokasi Formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

4. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} - \text{Alokasi Formula}$$

Pasal 5

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait dengan rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (✓) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - bagi Petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (k); dan
 - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (l).
- Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB III BESARAN DANA PEKON

Pasal 6

Besaran dana pekon pada masing-masing Pekon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV
PENYALURAN**

Pasal 7

1. Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

1. Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
2. Penyaluran Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Peratin menyampaikan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.
3. Penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester 1.
4. Rincian Dana Pekon yang diterima Pekon setiap Tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) .

**BAB V
PENGGUNAAN**

Pasal 9

Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. pembangunan sarana dan Prasarana Pekon;
- c. pengembangan Potensi ekonomi Lokal; dan
- d. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Pekon dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas Pekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) ditetapkan menjadi Peraturan Pekon.

Pasal 12

- (1) Peratin dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

1. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Pekon dalam hal Peratin tidak menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Pasal 14

1. Bupati mengurangi penyaluran dana Pekon dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tidak wajar.
2. Sisa Lebih Penggunaan Anggran (SiLPA) Dana Pekon yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Pekon yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Pekon yang diterima Pekon.
3. Penggunaan Dana Pekon yang tidak sesuai dengan prioritas tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat .

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03-02-2016
PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 03-02-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESIR BARAT
 NOMOR : 06 TAHUN 2016
 TANGGAL : 03 - 02 - 2016
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN DANA PEKON MASING - MASING PEKON SE KABUPATEN PESIR BRAT

NO	Id. Pekon	Nama Desa	Jumlah Pagu Dana Desa/Per Pekon	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	18.13.01	PESISIR TENGAH				
1	18.13.01.2001	WAY REDAK	627,054,350	250,821,740	250,821,740	125,410,870
2	18.13.01.2002	SERAY	652,396,900	260,958,760	260,958,760	130,479,380
3	18.13.01.2003	KAMPUNG JAWA	662,476,696	264,990,678	264,990,678	132,495,339
4	18.13.01.2004	RAWAS	655,794,754	262,317,901	262,317,901	131,158,951
5	18.13.01.2006	SUKA NEGARA	626,203,810	250,481,524	250,481,524	125,240,762
6	18.13.01.2007	PAHMUNGAN	637,573,316	255,029,326	255,029,326	127,514,663
JUMLAH			3,861,499,825	1,544,599,930	1,544,599,930	772,299,965
II	18.13.02	PESISIR SELATAN				
1	18.13.02.2001	NEGERI RATU TENUMBANG	623,681,893	249,472,757	249,472,757	124,736,379
2	18.13.02.2002	SUKARAME	607,509,731	243,003,893	243,003,893	121,501,946
3	18.13.02.2003	PELITA JAYA	615,239,683	246,095,873	246,095,873	123,047,937
4	18.13.02.2004	SUMUR JAYA	628,921,393	251,568,557	251,568,557	125,784,279
5	18.13.02.2005	TANJUNG JATI	590,048,134	236,019,254	236,019,254	118,009,627
6	18.13.02.2006	PAGAR DALAM	593,519,283	237,407,713	237,407,713	118,703,857
7	18.13.02.2007	TANJUNG SETIA	629,904,828	251,961,931	251,961,931	125,980,966
8	18.13.02.2008	BIHA	652,783,388	261,113,355	261,113,355	130,556,678
9	18.13.02.2009	WAY JAMBU	631,414,934	252,565,974	252,565,974	126,282,987
10	18.13.02.2010	MARANG	723,822,620	289,529,048	289,529,048	144,764,524
11	18.13.02.2011	TANJUNG RAYA	617,767,676	247,107,070	247,107,070	123,553,535
12	18.13.02.2012	BANGUN NEGARA	625,391,369	250,156,547	250,156,547	125,078,274
13	18.13.02.2013	ULOK MANIK	603,107,073	241,242,829	241,242,829	120,621,415
14	18.13.02.2014	PAKU NEGARA	639,593,966	255,837,586	255,837,586	127,918,793
15	18.13.02.2015	TULUNG BAMBAN	614,117,690	245,647,076	245,647,076	122,823,538
JUMLAH			9,396,823,659	3,758,729,463	3,758,729,463	1,879,364,732
III	18.13.03	LEMONG				
1	18.13.03.2001	TANJUNG JATI	605,719,788	242,287,915	242,287,915	121,143,958
2	18.13.03.2002	TANJUNG SAKTI	596,769,647	238,707,859	238,707,859	119,353,929
3	18.13.03.2003	WAY BATANG	607,734,160	243,093,664	243,093,664	121,546,832
4	18.13.03.2004	LEMONG	649,460,628	259,784,251	259,784,251	129,892,126
5	18.13.03.2005	CAHAYA NEGERI	597,244,550	238,897,820	238,897,820	119,448,910
6	18.13.03.2006	MALAYA	672,916,294	269,166,517	269,166,517	134,583,259
7	18.13.03.2007	BAMBANG	611,027,402	244,410,961	244,410,961	122,205,480
8	18.13.03.2008	PAGAR DALAM	625,872,543	250,349,017	250,349,017	125,174,509
9	18.13.03.2009	BANDAR PUGUNG	611,322,183	244,528,873	244,528,873	122,264,437
10	18.13.03.2010	PENENGAHAN	674,048,447	269,619,379	269,619,379	134,809,689
11	18.13.03.2011	RATA AGUNG	645,554,198	258,221,679	258,221,679	129,110,840
12	18.13.03.2012	SUKAMULYA	624,728,275	249,891,310	249,891,310	124,945,655
13	18.13.03.2013	PARDA HAGA	600,995,611	240,398,244	240,398,244	120,199,122
JUMLAH			8,123,393,725	3,249,357,490	3,249,357,490	1,624,678,745
IV	18.13.04	PESISIR UTARA				
1	18.13.04.2001	KURIPAN	614,446,275	245,778,510	245,778,510	122,889,255
2	18.13.04.2002	PADANG RINDU	601,531,303	240,612,521	240,612,521	120,306,261
3	18.13.04.2003	NEGERI RATU	599,122,322	239,648,929	239,648,929	119,824,464
4	18.13.04.2004	KERBANG DALAM	594,194,467	237,677,787	237,677,787	118,838,893
5	18.13.04.2005	KOTA KARANG	604,049,441	241,619,776	241,619,776	120,809,888
6	18.13.04.2006	BALAM	599,422,368	239,768,947	239,768,947	119,884,474
7	18.13.04.2007	WAY NARTA	591,759,344	236,703,738	236,703,738	118,351,869
8	18.13.04.2008	KERBANG LANGGAR	605,902,262	242,360,905	242,360,905	121,180,452
9	18.13.04.2009	WALUR	614,790,181	245,916,072	245,916,072	122,958,036
10	18.13.04.2010	BATU RAJA	601,797,682	240,719,073	240,719,073	120,359,536
11	18.13.04.2011	PEMANCAR	607,314,963	242,925,985	242,925,985	121,462,993
12	18.13.04.2012	GEDAU	611,871,503	244,748,601	244,748,601	122,374,301
JUMLAH			7,246,202,112	2,898,480,845	2,898,480,845	1,449,240,422

V	18.13.05	KARYA PENGGAWA				
1	18.13.05.2001	KEBUAYAN	603,685,588	241,474,235	241,474,235	120,737,118
2	18.13.05.2002	WAY NUKAK	618,751,716	247,500,686	247,500,686	123,750,343
3	18.13.05.2003	WAY SINDI	630,576,920	252,230,768	252,230,768	126,115,384
4	18.13.05.2004	PENENGAHAN	651,269,253	260,507,701	260,507,701	130,253,851
5	18.13.05.2005	MENYANCANG	608,255,641	243,302,256	243,302,256	121,651,128
6	18.13.05.2006	LA'AY	605,559,229	242,223,692	242,223,692	121,111,846
7	18.13.05.2007	PENGGAWA V ULU	619,132,477	247,652,991	247,652,991	123,826,495
8	18.13.05.2008	PENGGAWA V TENGAH	610,654,637	244,261,855	244,261,855	122,130,927
9	18.13.05.2009	WAY SINDI UTARA	588,481,339	235,392,535	235,392,535	117,696,268
10	18.13.05.2010	TEMBAKAK WAY SINDI	600,496,906	240,198,763	240,198,763	120,099,381
11	18.13.05.2011	WAY SINDI HANUAN	611,943,044	244,777,217	244,777,217	122,388,609
12	18.13.05.2012	ASAHAN WAY SINDI	599,859,203	239,943,681	239,943,681	119,971,841
JUMLAH			7,348,665,953	2,939,466,381	2,939,466,381	1,469,733,191
VI	18.13.06	PULAU PISANG				
1	18.13.06.2001	PASAR PULAU PISANG	605,629,145	242,251,658	242,251,658	121,125,829
2	18.13.06.2002	LABUHAN	596,506,533	238,602,613	238,602,613	119,301,307
3	18.13.06.2003	BANDAR DALAM	592,352,464	236,940,986	236,940,986	118,470,493
4	18.13.06.2004	PEKON LOK	588,032,113	235,212,845	235,212,845	117,606,423
5	18.13.06.2005	SUKADANA	595,946,252	238,378,501	238,378,501	119,189,250
6	18.13.06.2006	SUKA MARGA	593,212,822	237,285,129	237,285,129	118,642,564
JUMLAH			3,571,679,330	1,428,671,732	1,428,671,732	714,335,866
VII	18.13.07	WAY KRUI				
1	18.13.07.2001	PAJAR BULAN	599,319,557	239,727,823	239,727,823	119,863,911
2	18.13.07.2002	BUMI WARAS	597,689,046	239,075,618	239,075,618	119,537,809
3	18.13.07.2003	BANJAR AGUNG	598,183,050	239,273,220	239,273,220	119,636,610
4	18.13.07.2004	PENGGAWA V ILIR	607,814,906	243,125,963	243,125,963	121,562,981
5	18.13.07.2005	ULU KRUI	618,357,420	247,342,968	247,342,968	123,671,484
6	18.13.07.2006	GUNUNG KEMALA	623,124,680	249,249,872	249,249,872	124,624,936
7	18.13.07.2007	LABUHAN MANDI	613,894,593	245,557,837	245,557,837	122,778,919
8	18.13.07.2008	SUKA BARU	612,373,137	244,949,255	244,949,255	122,474,627
9	18.13.07.2009	PENGGAWA LIMA	606,936,427	242,774,571	242,774,571	121,387,285
10	18.13.07.2010	GUNUNG KEMALA TIMUR	608,735,399	243,494,160	243,494,160	121,747,080
JUMLAH			6,086,428,216	2,434,571,287	2,434,571,287	1,217,285,643
VIII	18.13.08	KRUI SELATAN				
1	18.13.08.2001	BALAI KENCANA	630,082,333	252,032,933	252,032,933	126,016,467
2	18.13.08.2002	WAY SULUH	605,871,443	242,348,577	242,348,577	121,174,289
3	18.13.08.2003	WAY NAPAL	614,801,796	245,920,719	245,920,719	122,960,359
4	18.13.08.2004	PADANG HALUAN	604,018,890	241,607,556	241,607,556	120,803,778
5	18.13.08.2005	LINTIK	616,922,473	246,768,989	246,768,989	123,384,495
6	18.13.08.2006	WALUR	603,006,519	241,202,608	241,202,608	120,601,304
7	18.13.08.2006	PEMERIHAN	601,457,039	240,582,815	240,582,815	120,291,408
8	18.13.08.2007	MANDIRI SEJATI	595,850,446	238,340,178	238,340,178	119,170,089
9	18.13.08.2008	PADANG RAYA	605,609,676	242,243,870	242,243,870	121,121,935
10	18.13.08.2009	SUKA JADI	599,749,511	239,899,804	239,899,804	119,949,902
JUMLAH			6,077,370,125	2,430,948,050	2,430,948,050	1,215,474,025
IX	18.13.09	NGAMBUR				
1	18.13.09.2001	SUMBER AGUNG	627,846,357	251,138,543	251,138,543	125,569,271
2	18.13.09.2002	ULOK MUKTI	666,502,219	266,600,887	266,600,887	133,300,444
3	18.13.09.2003	NEGERI RATU NGAMBUR	651,131,529	260,452,612	260,452,612	130,226,306
4	18.13.09.2004	PEKON MON	671,561,590	268,624,636	268,624,636	134,312,318
5	18.13.09.2005	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	653,764,043	261,505,617	261,505,617	130,752,809
6	18.13.09.2006	SUKA BANJAR	653,612,245	261,444,898	261,444,898	130,722,449
7	18.13.09.2007	SUKA NEGARA	625,709,870	250,283,948	250,283,948	125,141,974
8	18.13.09.2008	MUARA TEMBULIH	600,294,838	240,117,935	240,117,935	120,058,968
9	18.13.09.2009	BUMI RATU	641,649,406	256,659,762	256,659,762	128,329,881
JUMLAH			5,792,072,096	2,316,828,839	2,316,828,839	1,158,414,419
X	18.13.10	BENGGUNAT				
1	18.13.10.2001	NEGERI RATU NGARAS	640,086,139	256,034,456	256,034,456	128,017,228
2	18.13.10.2002	KOTA BATU	643,223,011	257,289,204	257,289,204	128,644,602
3	18.13.10.2003	MULANG MAYA	637,333,091	254,933,237	254,933,237	127,466,618
4	18.13.10.2004	RAJABASA	608,924,399	243,569,760	243,569,760	121,784,880
5	18.13.10.2005	PARDASUKA	616,906,978	246,762,791	246,762,791	123,381,396
6	18.13.10.2006	PADANG DALAM	609,407,023	243,762,809	243,762,809	121,881,405
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	631,996,392	252,798,557	252,798,557	126,399,278
8	18.13.10.2008	SUKARAME	622,494,119	248,997,648	248,997,648	124,498,824
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	598,118,888	239,247,555	239,247,555	119,623,778

JUMLAH			5,608,490,041	2,243,396,016	2,243,396,016	1,121,698,008
XI	18.13.11	B. BELIMBING				
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	733,091,943	293,236,777	293,236,777	146,618,389
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	633,195,098	253,278,039	253,278,039	126,639,020
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	664,658,747	265,863,499	265,863,499	132,931,749
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	667,967,133	267,186,853	267,186,853	133,593,427
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	629,635,169	251,854,067	251,854,067	125,927,034
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	665,467,617	266,187,047	266,187,047	133,093,523
7	18.13.11.2007	WAY HARU	644,592,913	257,837,165	257,837,165	128,918,583
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	674,079,210	269,631,684	269,631,684	134,815,842
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	637,804,091	255,121,636	255,121,636	127,560,818
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	634,359,089	253,743,636	253,743,636	126,871,818
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	601,700,097	240,680,039	240,680,039	120,340,019
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	605,587,622	242,235,049	242,235,049	121,117,524
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	650,010,151	260,004,060	260,004,060	130,002,030
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	625,868,039	250,347,215	250,347,215	125,173,608
JUMLAH			9,068,016,919	3,627,206,768	3,627,206,768	1,813,603,384
JUMLAH TOTAL (l s.d XI)			72,180,642,000	28,872,256,800	28,872,256,800	14,436,128,400

Keterangan :

1. Jumlah Pagu DD Kabupaten 72,180,642,000
2. Dibagi 116 Pekon 72,180,642,000
3. Saldo -

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDRÖTÜL IKHWÂN

NO	Id. Pekon	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			KGI						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) + (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(18) = (4) + (18)					
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	565,640,000	1,333	0.00941	0.00235	230	0.00936	0.328%	64.21	0.02215	0.221%	53.33	0.00754	0.226%	0.01011	66,356,392	631,996,392	
8	18.13.10.2008	SUKARAME	565,640,000	651	0.00459	0.00115	141	0.00574	0.201%	100.44	0.03465	0.346%	48.00	0.00679	0.204%	0.00866	56,854,119	622,494,119	
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	565,640,000	289	0.00204	0.00051	77	0.00313	0.110%	31.88	0.01100	0.110%	52.78	0.00747	0.224%	0.00495	32,478,888	598,118,888	
20	18.13.11	BENGKUNAT BELIMBING																	
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	565,640,000	4,353	0.03072	0.00768	741	0.03015	1.055%	121.22	0.04181	0.418%	72.73	0.01029	0.309%	0.02550	167,451,943	733,091,943	
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	565,640,000	1,289	0.00910	0.00227	231	0.00940	0.329%	75.43	0.02602	0.260%	50.00	0.00707	0.212%	0.01029	67,555,098	633,195,098	
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	565,640,000	2,911	0.02054	0.00514	388	0.01579	0.553%	43.59	0.01504	0.150%	68.67	0.00971	0.291%	0.01508	99,018,747	664,658,747	
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	565,640,000	2,365	0.01669	0.00417	489	0.01990	0.696%	57.82	0.01994	0.199%	57.78	0.00817	0.245%	0.01558	102,327,133	667,967,133	
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	565,640,000	1,738	0.01227	0.00307	199	0.00810	0.283%	36.29	0.01252	0.125%	61.11	0.00864	0.259%	0.00975	63,995,169	629,635,169	
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	565,640,000	2,143	0.01512	0.00378	449	0.01827	0.639%	56.26	0.01941	0.194%	72.73	0.01029	0.309%	0.01520	99,827,617	665,467,617	
7	18.13.11.2007	WAY HARU	565,640,000	1,712	0.01208	0.00302	393	0.01599	0.560%	42.02	0.01449	0.145%	46.11	0.00652	0.196%	0.01202	78,952,913	644,592,913	
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	565,640,000	2,259	0.01594	0.00399	380	0.01546	0.541%	117.12	0.04040	0.404%	72.50	0.01026	0.308%	0.01651	108,439,210	674,079,210	
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	565,640,000	1,414	0.00998	0.00249	302	0.01229	0.430%	55.29	0.01907	0.191%	53.89	0.00762	0.229%	0.01099	72,164,091	637,804,091	
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	565,640,000	1,332	0.00940	0.00235	265	0.01078	0.377%	64.33	0.02219	0.222%	50.00	0.00707	0.212%	0.01047	68,719,089	634,359,089	
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	565,640,000	800	0.00565	0.00141	164	0.00667	0.234%	9.57	0.00330	0.033%	33.33	0.00471	0.141%	0.00549	36,060,097	601,700,097	
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	565,640,000	665	0.00469	0.00117	183	0.00745	0.261%	20.32	0.00701	0.070%	37.78	0.00534	0.160%	0.00608	39,947,622	605,587,622	
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	565,640,000	2,077	0.01466	0.00366	313	0.01274	0.446%	75.51	0.02605	0.260%	50.00	0.00707	0.212%	0.01285	84,370,151	650,010,151	
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	565,640,000	810	0.00572	0.00143	238	0.00968	0.339%	38.57	0.01331	0.133%	71.23	0.01008	0.302%	0.00917	60,228,039	625,868,039	
Total				141,698	1	0.25	24,575	1	0.35	2,899	1	0.10	*****	1	0.30	1	6,566,402,000	72,180,642,000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	72.180,642,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	65.614,240,000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	6.566,402,000 (e)
Jumlah Desa	116 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
(KG)	30% (j)

Pejabat berwenang/tanggung jawab

PPTK

Kru.

2016

Petugas Penghitung Dana Pekon

HUSNI ARIFIN, S.P.
NIP. 19650614 198603 1 008

MAD ZAINI, S.P.
NIP. 19770304 200604 1 010

RIWAN PUSPA WIJAYA, S.Sos
NIP. 19830604 200804 1 001